

ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN FUNGSI HUTAN PRODUKSI MENJADI SUAKA MARGASATWA PALIYAN DI YOGYAKARTA

Oleh:

Ditya Ariawan Pramada¹

Ir. Djuwadi, MS.²

Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M. Sc.³

INTISARI

Suaka Margasatwa Paliyan merupakan kawasan hutan di Yogyakarta. Luas total Suaka Margasatwa Paliyan adalah 434,6 ha. Fungsi hutan sebelum ditetapkan sebagai suaka margasatwa merupakan hutan produksi, kelas perusahaan jati. Pada tahun 2000 terdapat perubahan fungsi hutan Paliyan dari hutan produksi menjadi suaka margasatwa dengan dikeluarkannya SK Menhutbun nomor 171/KPTS-II/2000. Atas adanya perubahan kebijakan tersebut sehingga diperlukan adanya analisis kebijakan untuk menjawab pertanyaan mengapa dilakukan perubahan kebijakan, bagaimana proses perubahan kebijakan, serta dampak perubahan kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan bersifat eksploratif. Analisis perubahan kebijakan dilakukan melalui pendekatan sejarah dan pendekatan proses kebijakan. Hasil yang akan didapat berupa tingkatan proses perubahan kebijakan, yaitu formasi masalah, agenda kebijakan, rumusan kebijakan, adopsi kebijakan, penerapan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sumber informasi diperoleh dari wawancara *key informan*, catatan sejarah, dan data pendukung lainnya.

Hal yang melatarbelakangi perubahan kebijakan yaitu gangguan kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*) dan keberadaannya, serta keadaan tata air kawasan karst yang mengalami kerusakan. Faktor penghambat perubahan kebijakan yaitu berpotensi membatasi akses masyarakat serta munculnya konflik kepentingan. Faktor pendorong lolosnya rencana perubahan kebijakan menjadi agenda kebijakan yaitu tidak adanya penolakan masyarakat, persamaan persepsi antar pihak dan kepentingan politis. Implementasi kebijakan diantaranya lahirnya konsep hutan kebun, penolakan program GNRHL serta proyek rehabilitasi kawasan. Dampak sosial implementasi kebijakan yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, kesadaran pentingnya hutan, perasaan legal masuk hutan, peningkatan keamanan, bebas gangguan kera, adanya konflik lahan garapan, pengembangan ekowisata, peningkatan tenaga kerja, dan fluktuasi pendapatan masyarakat. Dampak ekologis yaitu peningkatan suksesi kawasan serta peningkatan upaya pelestarian kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*).

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Suaka Margasatwa, Paliyan

¹ Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jurusan Manajemen Hutan

² Staf Pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jurusan Manajemen Hutan

³ Staf Pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jurusan Manajemen Hutan

POLICY CHANGE ANALYSIS OF PRODUCTION FOREST FUNCTION TO PALIYAN WILDLIFE SANCTUARY IN YOGYAKARTA

Ditya Ariawan Pramada¹

Ir. Djuwadi, MS.²

Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M. Sc.³

ABSTRACT

Paliyan Wildlife Sanctuary is a forest area in Yogyakarta. Total area of Paliyan Wildlife Sanctuary is 434,6 ha. Forest function before it was state as wildlife sanctuary is a production forest, teak company class. In 2000 there was forest function change in Paliyan forest from production forest becoming wildlife sanctuary by releasing of SK Menhutbun number 171/KPTS-II/2000. Because of that policy change so it need to be analysed to answer question about why policy has changed, how was the process of policy change, and the policy change impact.

This research use qualitative approach with case study method and eksplorative characteristic. Policy change analysis is done by historical approach and policy process approach. Result that will be gotten is the level of policy change process, that is problem formation, policy agenda, policy formulation, policy adoption, policy implementation, and policy evaluation. Source of information obtained from interview with key informan, historical note, and other supporter data.

*Things caused policy change are long-tailed macaque (*Macaca fascicularis*) trouble and its existence, and bad hydrological condition of karst area. Policy change issue are having potential effect to limit public access and interest conflict. Factor causes policy proposal get away to agenda setting level are inexistence of public rejection, similar persepction between stakeholders and political importance. Policy implementation that happen are the born of hutan-kebun concept, rejection of GNRHL program and rehabilitation project. Social impact of policy implementation are improvement of public participation, awareness of forest importance, legal feeling entering forest, improvement of security and safety, monkey trouble free, conflict in cultivation area, increasing ecotourism, improvement of labour, and fluctuation public earnings. Ecological impact are improvement of area succession and improvement of conservation effort of long-tail macaque (*Macaca fascicularis*).*

Key Words : Policy Analysis, Wildlife Sanctuary, Paliyan

¹ Student at Departement of Forest Manajemen Faculty of Forestry Universitas Gadjah Mada

² Teaching Staff of Departement of Forest Manajemen Faculty of Forestry Universitas Gadjah Mada

³ Teaching Staff of Departement of Forest Manajemen Faculty of Forestry Universitas Gadjah Mada